

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Bahasan utama dalam kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tersebut kemudian peneliti simpulkan berdasarkan hasil kajian atas literatur sebagai berikut:

Pertama, latar belakang pembentukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau kemudian disebut KOSTRAD, tidak terlepas dari kondisi politik militer dan keamanan Indonesia pada saat itu. Dimana, pada kisaran tahun 1957 – 1959 tengah berada pada keadaan yang tidak stabil. Terlebih lagi setelah munculnya Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 yang menyebabkan timbulnya berbagai tuntutan dan ketegangan di daerah. Dahsyatnya ancaman yang dikhawatirkan atas ketegangan-ketegangan tersebut memaksa Presiden Soekarno untuk menyetujui usul Jenderal A. H. Nasution untuk mengumumkan keadaan darurat perang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi legitimasi bagi Angkatan Darat untuk terlibat dalam urusan-urusan di luar kepentingan urusan pertahanan dan keamanan. Periode ini kemudian disebut sebagai periode transisi karena selanjutnya sistem politik Indonesia beralih menjadi Sistem Demokrasi Terpimpin dari sebelumnya Demokrasi Liberal. Periode Demokrasi Terpimpin ini ditandai dengan dominasi Angkatan Darat yang semakin kuat dalam urusan politik. Hal tersebut ditandai dengan terpilihnya 12 Menteri yang berlatar belakang profesi Angkatan Darat. Bahkan, Jenderal A. H. Nasution memiliki tugas ganda sebagai perwira tinggi Angkatan Darat juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Kondisi politik yang berada pada situasi tidak menguntungkan tersebut berdampak pada kondisi keamanan di daerah. Dimana, sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik telah mengakibatkan tidak meratanya pembangunan ekonomi dan distribusi persenjataan. Terlebih lagi, konsepsi yang dikeluarkan Presiden Soekarno mengenai Nasakom telah mengakibatkan jurang pemisah yang semakin luas antara pusat dan daerah. Hal tersebut kemudian menimbulkan gerakan-

gerakan separatis dengan usaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebut saja PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta), suatu gerakan yang diprakarsai oleh Syafrudin Prawiranegara yang menggadang-gadangkan dirinya sebagai penyelamat Republik Indonesia. Upaya penyelesaian yang mengedepankan jalan musyawarah sebagai jalan yang dipilih oleh Pemerintah Republik Indonesia ditolak oleh simpatisan PRRI. Akibatnya, hal tersebut menyebabkan kontak senjata untuk melawan bangsa sendiri demi menjaga keutuhan kedaulatan negara.

Atas dasar kondisi politik dan keamanan tersebutlah kemudian muncul gagasan Jenderal A. H. Nasution untuk membentuk satu kesatuan yang bersifat *mobile* dan siap tempur. Terlebih lagi, Indonesia memiliki permasalahan yang tidak kunjung selesai dengan Belanda terkait pengembalian Irian Barat sebagai bagian atas wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut pun didukung oleh kondisi organisasi militer Indonesia yang masih bersifat teritorial yang fokus perhatiannya terbatas pada permasalahan-permasalahan daerah saja. Dengan demikian, dalam hal ini pembentukan atas kesatuan tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai ancaman kedaulatan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, keluarlah Surat Keputusan tertanggal 27 Desember 1960 mengenai pembentukan Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD). Namun, baru pada tanggal 10 April 1961, CADUAD diresmikan sebagai organisasi militer yang bertugas dalam upaya perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan yang terdiri dari satu Divisi Infanteri yang kemudian disebut Divisi II Korra-I/CADUAD dan satu Brigade – 3/Para. Sebagai Panglima atas organisasi militer ini, Jenderal A. H. Nasution mempercayakannya kepada Brigadir Jenderal Soeharto yang pada saat itu tengah memegang jabatan sebagai Deputy I KSAD dan Deputy wilayah Indonesia bagian Timur. Pertimbangan tersebut didasarkan pada latar belakang pendidikan dan karir militer Soeharto yang sebelumnya sempat tergabung ke dalam KNIL dan juga PETA. Terlebih lagi, pada periode revolusi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Brigadir Jenderal Soeharto pun banyak terlibat dalam operasi-operasi penting. Atas dasar itulah, beban Panglima atas CADUAD dipertanggungjawabkan kepada dirinya.

Kedua, mengenai kepemimpinan Brigadir Jenderal Soeharto dalam mengembangkan KOSTRAD. Semula, KOSTRAD atau CADUAD dibentuk sebagai kesatuan yang disiapkan dalam upaya penyelesaian Irian Barat. Maka, setelah operasi perebutan selesai dilaksanakan, pada tanggal 1 Desember 1962 Brigadir Jenderal Soeharto mengajukan telaahan staf mengenai keberadaan kesatuan yang dipimpinnya tersebut. Atas dasar telaahan staf tersebut kemudian pada tanggal 19 Februari 1963 keluar surat keputusan mengenai penghapusan Korra-I/CADUAD dan diganti menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau kemudian disebut KOSTRAD. Selanjutnya, sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut, KOSTRAD mengalami beberapa perbaikan dan perubahan termasuk mengenai penamaan divisi yang tergabung di dalamnya. Dimana, Divisi Infanteri yang semula diberi nama Divisi II kemudian berganti nama menjadi Komando Tempur-II atau kemudian disingkat Kopur-II/KOSTRAD. Begitupun dengan Brigif-3/Para yang kemudian berganti nama menjadi Komando Tempur Lintas Udara atau kemudian didingkat Kopur Linud/KOSTRAD. Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain dalam perkembangan organisasi, terdapat beberapa personil yang dimutasi dan mengisi posisi-posisi baru.

Kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Soeharto berkaitan dengan Kesatuan KOSTRAD diawal pembentukannya lebih banyak menitikberatkan pada pembinaan personil. Hal tersebut ditujukan untuk menyiapkan kesiapan prajurit-prajurit yang tergabung di dalam KOSTRAD untuk mengikuti dan melibatkan diri dalam operasi-operasi gabungan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama kurun waktu Brigadir Jenderal Soeharto menjabat, tercatat beberapa kali KOSTRAD melakukan latihan-latihan dan pembinaan, baik secara mandiri maupun gabungan. Selanjutnya, kebijakan mengenai kelengkapan logistik, di awal pembentukannya yang memang berada pada fase genting, maka kelengkapan logistik kesatuan dipenuhi seadanya. Namun demikian, dalam menjalankan tugas ini, Pangkostrad dalam hal ini Brigadir Jenderal Soeharto, dibantu oleh dua badan khusus yakni Badan Peralatan KOSTRAD atau Pal KOSTRAD dan Badan Pembekalan Angkutan KOSTRAD atau dikenal pula dengan sebutan Bekang KOSTRAD. Terakhir, kebijakan mengenai pataka yang kemudian menjadi identitas bagi kesatuan ini.

Dimana, kebijakan Brigadir Jenderal Soeharto dalam urusan pataka ini lebih menitikberatkan pada identitas yang harus menjadi ciri khas dari kesatuan. Maka, identitas yang paling khas dari pataka milik KOSTRAD adalah tercantumnya tulisan Dharma Putra yang berarti putra patriotik yang menjunjung pelaksanaan gagasan negara dengan keberanian dan kebenaran. Selain itu, KOSTRAD pun memiliki motto yang kemudian menjadi ciri khasnya pula yakni *Yudha Nirbaya Bhakti* yang berarti putra bangsa yang mengabdikan untuk negeri dengan cara melenyapkan musuh-musuh.

Ketiga, keberhasilan-keberhasilan yang berhasil dicapai KOSTRAD selama kepemimpinan Brigadir Jenderal Soeharto. Selama kepemimpinan beliau, sejarah mencatat bahwa KOSTRAD terlibat dalam tiga peristiwa penting yakni Operasi Trikora, Operasi Dwikora, dan terakhir penyelesaian atas peristiwa G 30 S. Dalam operasi Trikora sendiri, KOSTRAD atau pada saat itu namanya masih CADUAD maju sebagai salah satu kesatuan pokok dengan nama samaran Komando Lesmono di bawah pemimpin Kolonel Infanteri U. Rukamana. Pada tanggal 2 Agustus 1962, CADUAD berhasil melaksanakan fase infiltrasi dan sampai di wilayah Teluk Peleng yang secara geografis dekat dengan Biak yang merupakan pusat komando dari Pasukan Belanda. Selanjutnya, setelah operasi memasuki fase eksploitasi, tercatat beberapa kali CADUAD melakukan kontak senjata dengan Pasukan Belanda. Hingga akhirnya, setelah disepakatinya Persetujuan New York, maka kedua negara harus melakukan gencatan senjata dan operasi telah memasuki fase konsolidasi. Dalam fase terakhir ini, CADUAD bertindak sebagai kesatuan yang mewakili Indonesia di dalam kontingan UNTEA hingga Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Selain operasi Trikora, KOSTRAD pun terlibat dalam operasi Dwikora yang dalam hal ini tugasnya menggeret kekuatan militer Inggris di wilayah Malaysia dan Kalimantan bagian Utara. Hal tersebut dilakukan karena dalam melaksanakan operasi ini KOSTRAD yang tergabung dengan kesatuan-kesatuan lainnya menunggu perintah dan komando dari atasan. Sehingga, sampai pertengahan tahun 1965 tidak terjadi kontak senjata yang begitu berarti. Hingga pada akhirnya Indonesia mengalami kejadian pilu pada tanggal 30 September 1965 yakni penculikan atas perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Untuk itu, sebagai upaya

penyelesaian atas permasalahan dalam negeri tersebut, maka pada tanggal 11 Agustus 1966 Pemerintah Indonesia memilih untuk mengakhiri konfrontasi tersebut melalui upaya perundingan. Selanjutnya, berkaitan dengan peranan KOSTRAD dalam operasi penyelesaian G 30 S, upayanya lebih berkaitan dengan usaha pengamanan dan pengambilalihan komando di dalam negeri oleh Panglima KOSTRAD, Mayjen Soeharto. Mengingat, perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang lainnya telah hilang diculik. Dalam upaya penyelesaian atas permasalahan ini, KOSTRAD bekerja sama dengan RPKAD di bawah Komando Sarwo Edhie Wibowo. Langkah-langkah yang diambil sebagai upaya awal diantaranya adalah merebut kembali kantor RRI Jakarta yang sempat dikuasai oleh golongan separatis. Selain itu, KOSTRAD pun berhasil membekukan izin penerbitan beberapa surat kabar yang dianggap berbahaya, merebut kembali Kantor Telekomunikasi, dan melakukan perebutan kembali atas Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah. Hingga akhirnya, secara berturut-turut pimpinan atas gerakan separatis ini berhasil di tangkap dan diadili.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII semester I dalam Kurikulum 2013, konten ini dapat menunjang Kompetensi Dasar (KD) nomor **(3.1)** yakni Menganalisis upaya Bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G 30 S/PKI; KD nomor **(3.2)** yakni mengenai Mengevaluasi peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan Bangsa Indonesia pada masa 1945 – 1965. Maka, secara otomatis konten ini pun menunjang KD nomor **(4.1)** mengenai aspek keterampilan yakni berkaitan dengan kemampuan siswa dalam merekonstruksi upaya Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G 30 S/PKI; juga menunjang KD nomor **(4.2)** mengenai aspek keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah

dalam mempertahankan keutuhan negara dan Bangsa Indonesia pada masa 1945 – 1965. Berdasarkan konten ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami kedua kompetensi dasar tersebut khususnya dalam memaknai nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia agar lebih menambah rasa cinta mereka terhadap tanah air. Diharapkan konten ini dapat menambah wawasan siswa di luar materi yang selama ini diberikan di kelas, khususnya berkaitan dengan sejarah kekuatan militer Indonesia. Dimana, siswa dapat memahami peristiwa pembentukan salah satu kesatuan strategis dalam tubuh militer yang menjadi pasukan andalan bagi Indonesia dalam menumpas gerakan-gerakan separatis tersebut. Selain itu, siswa pun dapat mengetahui latar belakang pembentukan kesatuan tersebut.

2. Bagi instansi yang terkait diharapkan untuk kembali lebih mendukung dan membenahi arsip-arsip dan dokumen mengenai Sejarah Pembentukan dan Perkembangan KOSTRAD. Mengingat, pentingnya arsip-arsip dan dokumen tersebut untuk menunjang kajian mengenai sejarah-sejarah militer yang memang masih sangat kurang dan terbatas.
3. Bagi penelitian selanjutnya tentunya masih banyak hal yang dapat dikaji mengenai Sejarah Kesatuan KOSTRAD maupun kesatuan-kesatuan militer lainnya, terutama pada periode Orde Baru yang memang militer memiliki tempat tersendiri di dalam tatanan pemerintahan. Sangat sedikit tulisan yang membahas mengenai kekuatan kesatuan-kesatuan militer Indonesia. Untuk itu, diharapkan kedepannya bisa diperhatikan dan dijadikan bahan penelitian yang menarik agar menambah khazanah penulisan sejarah militer Indonesia.
4. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah, penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa terutama mengenai Sejarah Militer Indonesia.